

## Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Melalui Pengembangan Industri

Umar Reza Saputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH, No 3-5, Peleburan Kota Semarang, Jawa Tengah 50275  
E-mail: [umarreza@students.undip.ac.id](mailto:umarreza@students.undip.ac.id)

**Abstract:** Poverty becomes the priority issued of development from several regions in reducing the poverty rate. The success and failure of development in reducing poverty can be seen from the poverty rate in a region. The purpose of this study is to provide an alternative policies in reducing poverty rate in Brebes District that it is accordance with the Local Government Regulation No 2 of 2018. Data BPS Showed that Brebes has the largest number of poor people in Central Java. It is amount 16,22%. So that Brebes ranked as the third poor district after Kebumen and Wonosobo. The suggestion for that policy has took by the assessment of alternatives policy. It is to maximize the One Village One Product (OVOP) Program. OVOP program regarded as a program that can encourage the community in creating a product and opening jobs for poor people so that it can fill their daily necessary.

**Keywords:** Reducing Poverty, Public Policy Analysis, Policy Paper

**Abstrak:** Kemiskinan menjadi fokus pembangunan tersendiri dari beberapa wilayah untuk menurunkan angka kemiskinannya. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan disuatu daerah salah satunya dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan wilayahnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan alternatif kebijakan sehingga dapat menyusutkan angka kemiskinan sesuai dengan yang tertuang pada PERDA Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikarenakan Data BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah dengan presentase penduduk miskin sebesar 16,22%. Berdasarkan presentase penduduk miskin tersebut Kabupaten Brebes menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. Rekomendasi yang diberikan untuk kebijakan ini berdasarkan atas penilaian alternatif kebijakan adalah memaksimalkan Program *One Village One Product* (OVOP) sangat disarankan untuk diterapkan sebagai rekomendasi kebijakan. Dengan adanya program OVOP ini menjadikan pemerintah daerah dapat menggiatkan masyarakat dalam hal menciptakan suatu produk dan membuka lapangan pekerjaan terhadap penduduk miskin yang dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

**Kata kunci:** Pengentasan Kemiskinan, Analisis Kebijakan Publik, Naskah Kebijakan

## PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam penilaian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi fokus pembangunan tersendiri dari beberapa wilayah untuk menurunkan angka kemiskinannya. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan disuatu daerah salah satunya dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan wilayahnya. Kemiskinan terjadi dikarenakan kemampuan dari individu penduduk belum bisa menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang pada akhirnya membuat dirinya tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Kemiskinan sampai sekarang masih menjadi permasalahan yang dihadapi diberbagai wilayah, Jawa Tengah juga termasuk wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Salah satu wilayah yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes. Upaya pemerintah untuk selalu menekan angka kemiskinan terus dilakukan dengan berbagai program misalnya adanya program Dana Desa, dalam kajian ( Darmi, T.. & Iqbal, M.M. 2019 ), namun sampai sekarang masih fluktuatif.

Dengan telah diberlakukannya PP No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk itu Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusutkan angka kemiskinan di wilayahnya. Dalam mengimplementasikan PP tersebut memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang mumpuni ( Darmi, T. Dkk. 2018).

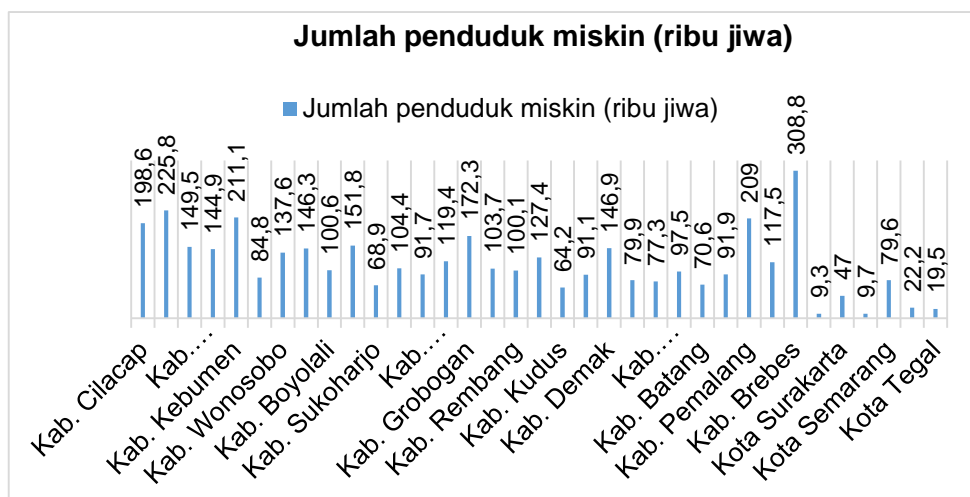
Kemiskinan ialah salah satu permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh di setiap wilayah. Provinsi Jawa tengah juga merupakan salah satu dari wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih mengalami fluktuatif atau dengan kata lain masih mengalami penurunan dan kenaikan jumlah (lihat gambar 1). Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah sebesar 3.897.200 jiwa penduduk (2018), tahun 2019 sebesar 3.743.230 jiwa penduduk dan ditahun 2020 sebesar 3.980.900 jiwa penduduk jawa tengah.

**Tabel 1. Jumlah penduduk dan Presentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2018-2020**

Keterangan	2018	2019	2020
Jumlah penduduk	34.490.835	34.718.204	34.738.244
Penduduk Miskin	3.897.200	3.743.230	3.980.900
Presentase (%)	11,30	10,78	11,46

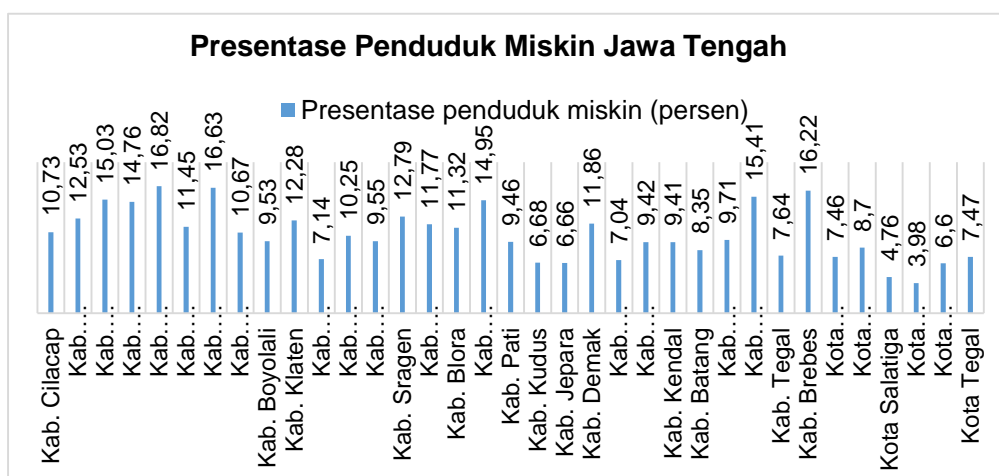
Sumber: Data diolah dari BPS Jawa Tengah (diakses pada 2 Maret 2021)

Dari Tabel 1 terlihat bahwa tingkat kemiskinan rata-rata di wilayah Jawa Tengah tahun 2018 mencapai 11,30% dari total jumlah penduduk Jateng. Pada tahun berikutnya tahun 2019 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,52% menjadi 10,78% dari total jumlah penduduk dan kembali mengalami peningkatan ditahun 2020 sebesar 0,68% menjadi 11,46% dari total jumlah penduduk di Jawa Tengah. Dari sekian banyak jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah salah satu daerah yang memiliki penduduk miskin cukup banyak ialah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes menduduki peringkat terbanyak di Jawa Tengah dari tahun 2019 sebesar 293,20 rb penduduk miskin (Lihat Gambar 1).



**Gambar 1. Daftar jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah Tahun 2019**

Sumber: Data diolah dari BPS Jawa Tengah (diakses pada 2 Maret 2021)



**Gambar 2. Presentase Penduduk Miskin di Jawa tengah tahun 2019**

Sumber: Data diolah dari BPS Jawa Tengah (diakses pada 2 Maret 2021)

Pada tahun 2019 seperti yang terdapat dalam (Tabel 1) terlihat bahwa presentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai angka 10,78% dari total penduduk Jawa Tengah. Angka kemiskinan di Kabupaten Brebes setelah dilihat dari berbagai Kabupaten di Jawa Tengah terlihat menempati urutan pertama, meski begitu untuk presentase penduduk miskin menempati urutan ketiga setelah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo (lihat Gambar 2). Wilayah yang lebih tinggi dari presentase penduduk miskin Jawa Tengah yaitu seperti Kabupaten Kebumen dengan presentase tertinggi di Jawa Tengah yang mencapai 16,82% dari total penduduk di Kabupaten Kebumen, kedua Kabupaten Wonosobo mencapai 16,63% dari total penduduk Kabupaten Wonosobo, yang ketiga Kabupaten Brebes mencapai 16,22% dari total penduduk Kabupaten Brebes. Faktor kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius di beberapa wilayah, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya wilayah tersebut dalam mengelola industri sumber daya alam (lihat Tabel 2), tingkat pendidikan suatu daerah yang masih cukup rendah (lihat Tabel 3), sampai dengan keterbatasan mengenai IPTEK. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kab. Brebes usia mengenyam pendidikan masih terdapat yang belum/ tidak sekolah sebesar 0,55%, dan yang tidak bersekolah setelah SMA mencapai 33,91% (BPS Kab. Brebes, 2019).

**Tabel 2. Jumlah Industri di Kabupaten Brebes 2018**

Kecamatan	Industri Kecil	Industri Menengah	Industri Besar	Jumlah Total
01. SALEM	303	-	-	303
02. BANTARKAWUNG	219	-	-	219
03. BUMIAYU	618	-	-	618
04. PAGUYANGAN	186	1	-	187
05. SIRAMPOG	106	1	-	107
06. TONJONG	343	-	-	343
07. LARANGAN	267	-	-	267
08. KETANGGUNGAN	413	-	-	413
09. BANJARHARJO	391	-	-	391
10. LOSARI	569	2	-	571
11. TANJUNG	298	2	1	301
12. KERSANA	294	1	1	296
13. BULAKAMBA	631	4	1	636
14. WANASARI	325	4	-	329
15. SONGGOM	190	-	-	190
16. JATIBARANG	629	-	-	629
17. BREBES	833	2	-	835
<b>Jumlah 2018</b>	<b>6.615</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>6635</b>

Sumber: Data diolah dari BPS Kab. Brebes 2018 (diakses 2 Maret 2021)

Tabel 2. menunjukkan jumlah industri yang berada di Kabupaten Brebes ditahun 2018 dengan jumlah industri total sebesar 6.635 industri. Selanjutnya Kecamatan Bulakamba menjadi kecamatan dengan jumlah industri terbanyak yaitu 636 industri dan Kecamatan Sirampong menjadi kecamatan dengan jumlah industri paling sedikit yaitu 107 industri. Dari tabel 2 tersebut kita ketahui bahwa di Kabupaten Brebes di tahun 2018 sebagian besar industri dengan kategori kecil, selanjutnya industri menengah hanya terdapat 17 industri dan industri besar berjumlah 3 industri saja. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan juga pelaku industri harus bekerjasama meningkatkan pengembangan industri tersebut sebagai terobosan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan memberdayakan penduduk miskin didalamnya.

**Tabel 3. Presentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki (dalam persen)**

Pendidikan Pra Sekolah	Laki laki	Perempuan	Laki laki dan Perempuan
Tidak punya Ijazah	25,17	33,69	29,45
SD sederajat	34,11	30,26	32,18

SMP sederajat	19,18	22,34	20,77
SMA sederajat	10,46	6,68	8,56
SMK/MA sederajat	7,18	3,71	5,44
D I/D II/ D III	0,60	1,01	0,81
S1 dan lebih tinggi	3,30	2,31	2,80

Sumber: BPS Kabupaten Brebes 2019 (diakses pada 8 Maret 2021)

Tabel 3. Tersebut menjelaskan mengenai presentase tingkat pendidikan di Kabupaten Brebes tahun 2019. Dapat kita ketahui presentasi tingkat pendidikan penduduk di kabupaten Brebes yang mempunyai ijazah sampai dengan SMA/SMK/MA tersebut masih rendah sekitar 14% jumlah laki-laki dan perempuan, yang memiliki Ijazah Pendidikan tinggi juga masih rendah sekali dimana diketahui dari tabel tersebut DI/DII/DIII hanya sekitar 0,81% serta S1/lebih tinggi hanya 2,80%.

Hasil penelusuran penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Brebes seperti yang dilakukan oleh (Andina, Barokah, Wulandari, Girsang, & Afifah, 2020) Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan ekowisata mangrove Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes sehingga dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat namun juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Penelitian berikutnya yaitu penelitian (Marmujiono, 2014) tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis bagaimana pengaruh variabel pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan rasio ketergantungan penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Brebes tahun 2009-2011 serta bagaimana strategi pengentasan kemiskinan tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut pembaruan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan alternatif kebijakan tentang pengentasan kemiskinan pada Kabupaten Brebes sehingga dapat menyusutkan angka pertumbuhan penduduk Miskin dengan melalui peningkatan UMKM yang ada.

Melihat dari deskripsi masalah tersebut yang mengacu pada data kemiskinan di Kabupaten Brebes yang menunjukkan data pada kelas tertinggi di Jawa Tengah, pada dasarnya naskah kebijakan ini dapat menjelaskan mengenai alternatif yang bisa dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan alternatif kebijakan sehingga dapat menyusutkan angka kemiskinan pada Kabupaten Brebes pada peraturan Pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan sesuai dengan yang tertuang pada PERDA Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2018.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan situasi kemiskinan penduduk di Kabupaten Brebes. Fokus penelitian ini adalah memberikan alternatif penilaian untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan dengan beberapa kriteria yang telah direkomendasikan oleh Dunn (2003: 429) yaitu *efektiveness, responsiveness, Fairness*.

Data yang digunakan berupa peraturan-peraturan, serta sumber lain yang relevan dalam mengkaji, menganalisis tentang pengentasan kemiskinan. Hal tersebut diperlukan untuk menganalisis kebijakan yang telah dibuat dalam menghambat angka kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Peneliti memilih lokasi penelitian pada Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikarenakan Data BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah dengan presentase penduduk miskin sebesar 16,22%. Berdasarkan presentase penduduk miskin tersebut Kabupaten Brebes menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis kebijakan pada artikel ini ialah untuk memberikan alternatif sehingga dapat menyusutkan angka kemiskinan pada Kabupaten Brebes pada Peraturan Pemerintah Daerah dalam menekan angka kemiskinan sesuai dengan yang tertuang pada PERDA Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2018.

Suatu kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, kemudian untuk dapat menekan angka kemiskinan pada Kabupaten Brebes telah dirumuskan dalam suatu kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut memiliki kriteria berhasil atau tidak. Selain itu, kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan. **Pertama**, kebijakan saat ini belum dapat menekan angka penduduk miskin Kabupaten Brebes. Kebijakan yang tertuang dalam PERDA Kab. Brebes No.2 tahun 2018 belum memberikan efek untuk dapat menekan angka penduduk miskin. Untuk dapat menekan laju dari penduduk miskin perlu adanya peningkatan industri yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Brebes untuk dapat berkembang dalam meningkatkan pendapatan penduduk. Hal tersebut didukung oleh Ishatono dan Raharjo (2016), Siregar dan Wahyuniarti (2007), dan Arsini (2016) yang menyatakan bahwa usaha industri ekonomi kreatif dapat mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan pertama yaitu efisiensi sebagai suatu usaha untuk dapat menekan angka kemiskinan.

Kriteria pertama untuk dapat menekan laju dari penduduk miskin ialah pengembangan industri UMKM.

**Kedua**, meskipun pemerintah daerah Brebes telah melakukan banyak upaya untuk dapat menyusutkan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes hal ini belum dapat mengurangi dengan signifikan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, responsivitas menjadi tujuan untuk merespon angka tersebut sehingga dapat menyusutkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes. Kriteria untuk dapat memaksimalkan tujuan ini yaitu pemenuhan kebutuhan penduduk miskin untuk dapat menciptakan maupun mengembangkan usaha sehingga mereka mempunyai pendapatan sebagai pemenuhan hidup mereka.

**Ketiga**, pemerataan pengembangan industri UMKM di Kabupaten Brebes perlu ditingkatkan untuk menciptakan produksi yang dapat memiliki daya saing dalam pemasarannya. Dari beberapa produk unggulan di Kabupaten Brebes, hanya terdapat dua produk yang termasuk produk unggulan yaitu telur asin dan rumput laut (Anis dan Wibowo, 2018). Oleh karena itu, keadilan juga harus menjadi tujuan dari kebijakan. Kriteria untuk mengukur kemajuan menuju tujuan keadilan ini ialah Pemerataan dalam dalam memfasilitasi UMKM.

#### **Alternatif Kebijakan:**

Kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes telah dibuat yaitu pada Perda Kab. Brebes No. 2 Tahun 2018, perda tersebut kemudian dianalisis untuk dapat melihat terkait dengan penerapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Setelah melihat data dari BPS yang menunjukkan angka kemiskinan perkapita masih relatif rendah sedangkan jumlah penduduk miskin masih tinggi, hal tersebut merupakan salah satu penilaian dari keefektifan kebijakan yang telah dibuat (Seran, 2017). Selanjutnya, terdapat beberapa usulan dalam kebijakan PERDA tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas PERDA dan/ atau dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerapan maupun dalam proses pembentukan PERDA baru terkait dengan pengentasan kemiskinan. Beberapa usulan yang dimaksud antara lain:

1. Memaksimalkan Program OVOP (*One Village One Product*)

Alternatif ini sebenarnya ialah program dari pemerintah untuk dapat meningkatkan pengembangan Industri Kecil dengan cepat. Pendekatan Program OVOP merupakan pengembangan UMKM dari program insentif pemerintah yang diberikan kepada masyarakat (khususnya pelaku usaha) yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi sumber daya alam di daerah tersebut, serta



dalam rangka mempercepat pengembangan produk unggulan dari suatu daerah sehingga dapat memiliki nilai jual yang tinggi serta diminati oleh masyarakat luas.

OVOP menjadi program bisnis penduduk yang berupaya untuk menciptakan rasa kebanggaan penduduk terhadap sumber daya alam yang dimilikinya dan kemudian untuk dapat dikembangkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual sehingga menjadi sumber pendapatan masyarakat. Dengan adanya Program OVOP ini diharapkan dapat mampu meningkatkan produksi industri UMKM yang berada di Kabupaten Brebes untuk terus meningkatkan serta menambah variasi produk dan nilai jual dari produksinya sehingga dapat menciptakan keunggulan dari setiap UMKM di Kabupaten Brebes serta memberdayakan penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam perkembangan industri untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan mereka supaya dapat memenuhi kebutuhannya.

## 2. Industri: Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi

Alternatif ini diberikan untuk dapat meningkatkan nilai jual produk yang tinggi sehingga pendapat untuk penduduk miskin tercukupkan dengan maksimal sesuai dengan produk yang dihasilkan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan untuk dapat menciptakan kepercayaan kepada pembeli sebagai pelanggan terhadap kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Dengan demikian industri UMKM terus mendapat kepercayaan dari pelanggan mereka dan dapat meningkatkan pendapatan produksi dengan optimal. Persaingan industri saat ini dalam memerikan kualitas dan kuantitas produk terbaik mereka semakin ketat dan juga variatif. Oleh sebab itu, maka industri UMKM harus terus memperhatikan proses pemilihan bahanbaku sampai dengan menjadi suatu hasil produksi demi menjaga kualitas dan kuantitas produk mereka.

## 3. Mensinergikan kebijakan pengentasan kemiskinan

Alternatif ini diperuntukkan untuk dapat mengurangi angka penduduk miskin dengan menegakkan suatu kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya suatu kebijakan yang mengatur maka diharapkan dapat mampu mewujudkan keadilan bagi semua masyarakat. Pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam melakukan pengentasan kemiskinan harus bijak dan selalu memfokuskan kepada pemenuhan kesejahteraan penduduknya. Kesejahteraan penduduk merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah yang diberikan oleh konstitusi, kesejahteraan kemiskinan yang selalu disusutkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin terutama (Kusriyah dan Aulia, 2015). Selanjutnya dengan mensinergikan kebijakan yang sudah ada tersebut diharapkan pemerintah daerah lebih optimal dalam menekan angka kemiskinan penduduknya.

#### 4. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin

Alternatif ini mempunyai peran sangat penting untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan suatu usaha yang menghasilkan pendapatan bagi mereka. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes untuk menyusutkan angka kemiskinan di daerahnya. Salahsatu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk dapat mengelola kekayaan sumber daya yang dimilikinya dan juga menyediakan fasilitas pendukung guna mendukung perkembangan maupun pertumbuhan dari industri masyarakat untuk dapat menciptakan industri maupun mengembangkan industri yang dimilikinya. Sese kali pemerintah daerah dan beberapa pihak umum swasta juga mengadakan pameran untuk memasarkan produk dari industri yang diciptakan oleh UMKM di Kecamatan Brebes guna memperkenalkan dan mempromosikan produk mereka.

#### **Penilaian Alternatif Kebijakan:**

Penilaian alternatif kebijakan ini merupakan suatu langkah yang digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih optimal dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang diterapkan disuatu daerah. Pada tahap ini penilaian atau evaluasi dari semua kriteria yang telah ditentukan kemudian dianalisis dengan membandingkan alternatif-alternatif yang juga sudah dipilih. Pada tahap ini alternatif yang telah dipilih dalam naskah ini selanjutnya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai untuk pengentasan kemiskinan yaitu efisiensi, responsivitas dan keadilan (*Fairness*).

##### 1. Memaksimalkan Program *One Village One Product* (OVOP)

Efisiensi, keuntungan Program OVOP ini akan dapat dirasakan dengan sangat baik untuk dapat mengembangkan UMKM di Kabupaten Brebes serta dapat menciptakan produk yang beragam yang dapat berdaya saing di pasaran industri. Program ini memang butuh proses yang sangat kuat untuk dapat mendorong penduduk miskin supaya dapat mengentaskan kemiskinan. Dalam program ini tidak hanya didorong untuk menciptakan produk akan tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan penduduk miskin dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi manfaat lain untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Responsivitas, ini mungkin menjadi suatu tuntutan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan penduduk miskin. Pemerintah dituntut untuk mempunyai respon dan/ atau daya tanggap yang cepat untuk bisa

menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya program OVOP ini pemerintah memberikan suatu terobosan kepada masyarakat sebagai respon untuk dapat mengentaskan angka kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus mengawasi perkembangan program ini dan terus memperbaiki sehingga dalam implementasinya tepat dengan tujuan yang ditentukan. Program OVOP ini telah didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten, namun juga dalam implementasinya perlu dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai dengan perangkat desa (Anis dan Wibowo, 2018).

Keadilan, Program OVOP ini akan berjalan dengan optimal apabila dilakukan secara bertahap dan merata. Semua kalangan dapat menciptakan suatu inovasi dengan terpenuhinya kebutuhan mereka secara adil. Hal ini diperkuat oleh Anis dan Wibowo (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan program OVOP ini memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum adanya program tersebut serta dapat meningkatkan nilai tambah pada suatu produk.

## 2. Industri: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi

Efisiensi, alternatif ini nantinya dapat membantu dalam pengembangan industri dengan selalu memperhatikan pada kualitas dan kuantitas produksinya. Alternatif ini nantinya memungkinkan untuk mendukung pengembangan UMKM jika terus mendapat pengawasan terhadap suatu produk yang dihasilkan.

Responsivitas, alternatif ini akan menjangkau kepada tuntutan industri yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah namun kurang begitu maksimal dilaksanakan oleh UMKM. Pemerintah daerah dalam hal ini telah menyediakan beberapa pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi masyarakat dan mengadakan *event* pameran untuk dapat mengenalkan dan memasarkan produknya.

Keadilan, alternatif ini harus dapat menjangkau masyarakat miskin yang memiliki industri dan berada di pedesaan. Dan nantinya apabila peningkatan industri ini telah merata maka pemerintah menaruh harapan kepada industri tersebut untuk dapat menciptakan produk yang unggul dan memiliki kualitas dan kuantitas yang baik.

## 3. Mensinergikan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Efisiensi, alternatif ini perlu dikaji kembali untuk memperkuat pengentasan kemiskinan masyarakat Kabupaten Brebes terutama dalam hal pengembangan UMKM demi mewujudkan pengentasan kemiskinan yang maksimal melalui pemberdayaan UMKM.

Responsivitas, dalam pengentasan kemiskinan berada pada pemerintah daerah harus didukung juga oleh berbagai pihak dalam penyaluran kebutuhan penduduk. Pemberian bantuan harus langsung ke sasaran tetapi harus bekerjasama dengan baik dalam implementasinya serta dengan pengawasan yang intensif. Pada umumnya kebijakan kemiskinan ini belum tepat sasaran diperkuat oleh Fatony (2014) bahwa mereka yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan dan mendapatkan akses informasi.

Keadilan, penegakan kebijakan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah angka penduduk miskin melalui pemerataan dalam memfasilitasi UMKM. Kebijakan ini juga harus tertuju kepada lapisan-lapisan penduduk di pedesaan untuk dapat mengembangkan industrinya.

#### 4. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin

Efisiensi, keuntungan dari alternatif ini yaitu untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin. Dengan memberikan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kemampuan serta dalam meningkatkan pendapatannya maka dengan sendirinya pengusaha industri tersebut dapat menciptakan peluang untuk mengembangkan UMKM mereka.

Responsivitas, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pengentasan kemiskinan dengan pemenuhan hak-hak dasar dari penduduk miskin, seperti kesehatan, pendidikan dan memberdayakan masyarakat penduduk miskin untuk dapat menciptakan produk dan nantinya mendapatkan pendapatan dari produknya tersebut. Program untuk memenuhi hak tersebut harus berkelanjutan dalam membantu masyarakat miskin tersebut untuk menciptakan pembangunan SDM yang berkualitas.

Keadilan, dalam peningkatan hak-hak dasar tersebut dalam implementasinya harus menyeluruh terhadap penduduk miskin jangan sampai ada yang merasa dirugikan akibat dengan bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membangun masyarakat yang dapat berdaya saing tinggi dalam menciptakan produk.

**Tabel 3. Penilaian Alternatif Kebijakan**

Tujuan	Kriteria	Alternatif			
		Memaksimalkan Program OVOP ( <i>One Village One Product</i> )	Industri: Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi	Mensinergikan kebijakan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
Efisiensi	Mengembangkan UMKM	Sangat baik, UMKM dapat menuju kearah industri dan menciptakan produk yang dapat bersaing	Baik, memberikan dampak yang signifikan pada sektor industri	sedang, dengan pelatihan dan dukungan mampu memberdayakan penduduk	Baik, mampu memberikan pendapatan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup
Responsivitas	Pemenuhan kebutuhan penduduk miskin	Baik, jika dalam implementasinya sesuai	Sedang, perlu sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industry	Baik, jika kontrol dalam pembagian bantuan merata serta dengan pengawasan yang intensif	Baik, harus berkelanjutan
<i>Fairness</i> (Keadilan)	Pemerataan dalam memfasilitasi UMKM	Sangat Baik, dapat menarik minat penduduk untuk menghasilkan produk	Baik, jika mampu menciptakan produk dengan hasil yang maksimal	Baik, langsung kesasaran tetapi harus bekerjasama dengan baik dalam implementasinya	Baik, bila ada pengawasan dari pemerintah

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

## SIMPULAN

Kebijakan penyusutan angka kemiskinan pada Kabupaten Brebes terus dilakukan dengan berbagai alternatif terhadap program maupun kebijakan yang telah ada guna

mendapatkan solusi terbaik yang strategis dalam menyusutkan angka penduduk miskin di Kabupaten Brebes. Rekomendasi kebijakan ini diberikan berdasarkan atas penilaian alternatif kebijakan. Berdasarkan penialain yang dapat dilihat pada (Tabel 3) alternatif kebijakan memaksimalkan Program OVOP sangat disarankan untuk diterapkan sebagai rekomendasi kebijakan. Dengan adanya program OVOP ini menjadikan pemerintah daerah untuk menggiatkan masyarakat dalam hal menciptakan suatu produk dan membuka lapangan pekerjaan terhadap penduduk miskin yang dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Program OVOP sendiri juga menuntut masyarakat untuk terus berkembang mengembangkan produk yang telah dibuatnya dengan berbagai inovasi sehingga dapat bersaing dipasaran.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andina, A. N., Barokah, S., Wulandari, O. A., Girsang, A. A., & Afifah, R. A. (2020). Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pandansari Kabupaten Brebes Untuk Mengurangi Kemiskinan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 252-261.
- Anis, A., & Wibowo, R. A. (2018). Produk Unggulan Sebagai Daya Saing Daerah Studi Pembangunan UKM Di Kabupaten Brebes. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(2).
- Arsini, A. (2016). Pemberdayaan Petani Perempuan Dalam Usaha Ekonomi Produktif Untuk Mengatasi Pengangguran Musiman dan Kemiskinan Di Desa Putat Purwodadi Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 14(1), 87-100.
- Dunn, N, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publi, Edisi Kedua. Terjemahan oleh Wibawa, dkk. 2003. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darmi, T., & Mujtahid, M.M. ( 2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*. Vol 3, No 1. Pp. 547 – 566.
- Darmi, Titi., Suwitri, Sri., Yuwanto & Sundarso ( 2017). Capacity Building as Accelerator for Improving Autonomous Region Recently Knows as (DOB): Case Study in Seluma Distrcit Bengkulu Province, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*. Vol 7, Nomor 3. Pp 100-117
- Fatony, A. (2017). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis *Participatory Poverty Assessment*. Kasus Yogyakarta. *Sosio Konsepsia*, 16(2), 123-142.
- Ishatono, I., & Raharjo, S.T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2) 159.
- Kusriyah, S., & Aulia, D. (2015). Kebijakan Daerah Dalam Ptoqram Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Di Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 319-328.
- Marmujiono, S. P. (2014). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAB.

- BREBES TAHUN 2009-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1), 26-38.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2018 tentang Penganggulan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganggulan Kemiskinan.
- Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *IPB dan Brighten Institute*.